



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-3.HN.03.05 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah tersusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023.**

KESATU...

- KESATU : Penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah memiliki laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan kategori atau peringkat kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H. LAOLY



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri terkait;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6. Para Gubernur terkait;
7. Para Bupati terkait;
8. Para Walikota terkait;
9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait;
10. Para Rektor Universitas terkait.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

**PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023**

Nilai tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan aspek pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah 100 (seratus). Adapun peringkat atau kategori yang digunakan sebagai hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH untuk periode Tahun 2023 terbagi atas:

1. Kategori EKA ACALAPATI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “*Eka*” = Pertama dan “*Acalapati*” = Paling Tinggi. Dengan demikian kategori *Eka Acalapati* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s.d. 100;

2. Kategori DWI TUNGGGA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu, “*Dwi*” = Dua dan “*Tungga*” = Tinggi. Dengan demikian kategori *Dwi Tungga* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 51 s.d. 75;

3. Kategori TRI BUNTARA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “*Tri*” = Tiga dan “*Buntara*” = Bersemangat, dengan demikian kategori *Tri Buntara* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang sedang bersemangat untuk menuju pengelolaan JDIH yang lebih baik. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 26 s.d. 50;

4. Kategori CATUR DANDANI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu “*Catur*” = Empat dan “*Dandani*” = Mempersiapkan. Dengan demikian kategori *Catur Dandani* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang masih dalam tahap persiapan. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIH yang memperoleh penilaian antara 0 s.d. 25.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

**HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023**

I. KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100
2.	Kementerian Sosial	99
3.	Kementerian Ketenagakerjaan	99
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	99
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99
6.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	98
7.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	98
8.	Kementerian Keuangan	98
9.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	97
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97
11.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	97
12.	Kementerian Perhubungan	97
13.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96
14.	Kementerian Perdagangan	96
15.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	94
16.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	94
17.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	93
18.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92
19.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90
20.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	89
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	88
22.	Kementerian Agama	83

No.	Nama Instansi	Nilai
23.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	80
24.	Kementerian Luar Negeri	79
25.	Kementerian Sekretariat Negara	78
26.	Kementerian Pertanian	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
27.	Kementerian Dalam Negeri	73
28.	Kementerian Pertahanan	72
29.	Kementerian Perindustrian	69
30.	Kementerian Kesehatan	68
31.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	66
32.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	61

II. LEMBAGA NEGARA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Mahkamah Agung	98
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	98
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	97
4.	Ombudsman Republik Indonesia	96
5.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	95
6.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	87
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
7.	Komisi Yudisial	72
8.	Mahkamah Konstitusi	66
9.	Komisi Pemberantasan Korupsi	63

III. LEMBAGA NON-STRUKTURAL

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	98
2.	Komisi Aparatur Sipil Negara	97

No.	Nama Instansi	Nilai
3.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	96
4.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	95
5.	Komisi Pemilihan Umum	95
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	94
7.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	89
8.	Komisi Informasi Pusat	89
9.	Otoritas Jasa Keuangan	86
10.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
11.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	72
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	65
13.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	64

IV. LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	96
2.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	95
3.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	94
4.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	94
5.	Badan Narkotika Nasional	93
6.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	93
7.	Radio Republik Indonesia	92
8.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	91
9.	Badan Pangan Nasional	91
10.	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	90
11.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	90
12.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	89
13.	Arsip Nasional Republik Indonesia	89
14.	Lembaga Administrasi Negara	89
15.	Perpustakaan Nasional	88
16.	Badan Informasi Geospasial	88

No.	Nama Instansi	Nilai
17.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	86
18.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	86
19.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	86
20.	Badan Standardisasi Nasional	80
21.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	78
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
22.	Badan Siber dan Sandi Negara	75
23.	Televisi Republik Indonesia	74
24.	Badan Pusat Statistik	69
25.	Tentara Nasional Indonesia	67
26.	Badan Kepegawaian Negara	66
27.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	59

V. PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Provinsi Bali	99
2.	Provinsi Jawa Barat	98
3.	Provinsi Jawa Tengah	97
4.	Provinsi Banten	97
5.	Provinsi Jawa Timur	96
6.	Provinsi DKI Jakarta	95
7.	Provinsi Lampung	94
8.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	92
9.	Provinsi Sumatera Utara	92
10.	Provinsi Bengkulu	92
11.	Provinsi Kalimantan Timur	91
12.	Provinsi Kalimantan Barat	83
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83
14.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	83
15.	Provinsi Sulawesi Selatan	82
16.	Provinsi Aceh	82

No.	Nama Instansi	Nilai
17.	Provinsi Papua Barat Daya	80
18.	Provinsi Sulawesi Tengah	79
19.	Provinsi Kalimantan Tengah	78
20.	Provinsi Kalimantan Utara	77
21.	Provinsi Jambi	77
22.	Provinsi Sulawesi Barat	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
23.	Provinsi Riau	75
24.	Provinsi Kepulauan Riau	75
25.	Provinsi Sumatera Selatan	69
26.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	68
27.	Provinsi Sumatera Barat	66
28.	Provinsi Kalimantan Selatan	61
29.	Provinsi Maluku Utara	60
30.	Provinsi Sulawesi Utara	58
31.	Provinsi Gorontalo	56
32.	Provinsi Papua Barat	55

VI. KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d 100)			
1.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	98
2.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	97
3.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	97
4.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	97
5.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	96
6.	Kabupaten Mimika	Papua Barat	96
7.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	96
8.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	96
9.	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	96
10.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	96
11.	Kabupaten Jember	Jawa Timur	95

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
12.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	95
13.	Kabupaten Gianyar	Bali	95
14.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	95
15.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	95
16.	Kabupaten Lebak	Banten	94
17.	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	93
18.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	93
19.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	93
20.	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	93
21.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	93
22.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	93
23.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	92
24.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	92
25.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	91
26.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	91
27.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	91
28.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	91
29.	Kabupaten Pemasang	Jawa Tengah	91
30.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	91
31.	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	90
32.	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	90
33.	Kabupaten Way Kanan	Lampung	90
34.	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	90
35.	Kabupaten Bangli	Bali	90
36.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	89
37.	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	89
38.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	89
39.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	89
40.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	89
41.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	89
42.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	89
43.	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	89
44.	Kabupaten Buleleng	Bali	89

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
45.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	89
46.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	88
47.	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	88
48.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	88
49.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	88
50.	Kabupaten Serang	Banten	88
51.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	88
52.	Kabupaten Kampar	Riau	88
53.	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	88
54.	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	88
55.	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	87
56.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	87
57.	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	87
58.	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	87
59.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	86
60.	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	86
61.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	86
62.	Kabupaten Karangasem	Bali	86
63.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	85
64.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	85
65.	Kabupaten Subang	Jawa Barat	85
66.	Kabupaten Tangerang	Banten	85
67.	Kabupaten Jembrana	Bali	85
68.	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	85
69.	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	85
70.	Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	85
71.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	85
72.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	84
73.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	84
74.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	84
75.	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	84
76.	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	84
77.	Kabupaten Malang	Jawa Timur	84

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
78.	Kabupaten Blitar	Jawa Timur	84
79.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	83
80.	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	83
81.	Kabupaten Klungkung	Bali	83
82.	Kabupaten Batang Hari	Jambi	83
83.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	83
84.	Kabupaten Garut	Jawa Barat	83
85.	Kabupaten Simeulue	Aceh	83
86.	Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	83
87.	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	82
88.	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	82
89.	Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	81
90.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	81
91.	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	81
92.	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	81
93.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	81
94.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	80
95.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	80
96.	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	80
97.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	80
98.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	80
99.	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	80
100.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	80
101.	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	79
102.	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	79
103.	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	79
104.	Kabupaten Rokan Hilir	Riau	79
105.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	79
106.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	79
107.	Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	79
108.	Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	79
109.	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	79
110.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	78

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
111.	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	78
112.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	78
113.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	78
114.	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara	78
115.	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	78
116.	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	77
117.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	77
118.	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	77
119.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	77
120.	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	77
121.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	77
122.	Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	77
123.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	77
124.	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	76
125.	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	76
126.	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	76
127.	Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	76
128.	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
129.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	75
130.	Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	75
131.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	75
132.	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	75
133.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	75
134.	Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	75
135.	Kabupaten Tabanan	Bali	75
136.	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	74
137.	Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	74
138.	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	74
139.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	74
140.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	74
141.	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	74
142.	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	74

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
143.	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	74
144.	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	74
145.	Kabupaten Pidie	Aceh	74
146.	Kabupaten Badung	Bali	73
147.	Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	73
148.	Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	72
149.	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	72
150.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	72
151.	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	72
152.	Kabupaten Toba	Sumatera Utara	72
153.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	72
154.	Kabupaten Sarolangun	Jambi	72
155.	Kabupaten Siak	Riau	72
156.	Kabupaten Limapuluh Kota	Sumatera Barat	72
157.	Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	71
158.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	71
159.	Kabupaten Bireuen	Aceh	71
160.	Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	71
161.	Kabupaten Pesawaran	Lampung	71
162.	Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	71
163.	Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	71
164.	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	71
165.	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	70
166.	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	70
167.	Kabupaten Bungo	Jambi	70
168.	Kabupaten Pandeglang	Banten	70
169.	Kabupaten Aceh Barat	Aceh	70
170.	Kabupaten Magetan	Jawa Timur	70
171.	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	70
172.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	70
173.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	70
174.	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	70
175.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	70

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
176.	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	70
177.	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	70
178.	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	69
179.	Kabupaten Lampung Timur	Lampung	69
180.	Kabupaten Aceh Utara	Aceh	69
181.	Kabupaten Mukomuko	Bengkulu	69
182.	Kabupaten Aceh Timur	Aceh	69
183.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	69
184.	Kabupaten Tolitoli	Sulawesi Tengah	69
185.	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	69
186.	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	69
187.	Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	69
188.	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	69
189.	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	68
190.	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	68
191.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	68
192.	Kabupaten Pringsewu	Lampung	68
193.	Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	68
194.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	68
195.	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	68
196.	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	68
197.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	68
198.	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	68
199.	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	68
200.	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	68
201.	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	68
202.	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	68
203.	Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	68
204.	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	67
205.	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	67
206.	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	67
207.	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	67
208.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	67

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
209.	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	67
210.	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	67
211.	Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	67
212.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	67
213.	Kabupaten Tebo	Jambi	66
214.	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	66
215.	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	66
216.	Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	66
217.	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	66
218.	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	65
219.	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	65
220.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	65
221.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	65
222.	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	65
223.	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	65
224.	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	65
225.	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	64
226.	Kabupaten Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	64
227.	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	64
228.	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	64
229.	Kabupaten Labuhan Batu	Sumatera Utara	64
230.	Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	64
231.	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	64
232.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	64
233.	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	63
234.	Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	63
235.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	63
236.	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	63
237.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	63
238.	Kabupaten Bengkalis	Riau	63
239.	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	63
240.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sumatera Utara	63
241.	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat	63

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
242.	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	62
243.	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	62
244.	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	62
245.	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	61
246.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	61
247.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	61
248.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	61
249.	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	61
250.	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	60
251.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	60
252.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	60
253.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	60
254.	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	59
255.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	59
256.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	59
257.	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	58
258.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	58
259.	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	58
260.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	58
261.	Kabupaten Tambrauw	Papua Barat Daya	57
262.	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	56
263.	Kabupaten Seluma	Bengkulu	56
264.	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	56
265.	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	56
266.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	55
267.	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	55
268.	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	55
269.	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	54
270.	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	53
271.	Kabupaten Pelalawan	Riau	52
272.	Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
273.	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	49

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
274.	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	48
275.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	47
276.	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	46
277.	Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	46
278.	Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	46
279.	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan	44
280.	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	43
281.	Kabupaten Karo	Sumatera Utara	42
282.	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	38
283.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	36
284.	Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	36
285.	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	35
286.	Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur	34
287.	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	33
288.	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	32
289.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	32

VII. KOTA

No.	Nama Instansi		Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Kota Denpasar	Bali	96
2.	Kota Tanjung pinang	Kepulauan Riau	95
3.	Kota Tangerang	Banten	95
4.	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	94
5.	Kota Batam	Kepulauan Riau	93
6.	Kota Semarang	Jawa Tengah	93
7.	Kota Tegal	Jawa Tengah	92
8.	Kota Padang	Sumatera Barat	92
9.	Kota Metro	Lampung	91
10.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	91
11.	Kota Salatiga	Jawa Tengah	91
12.	Kota Bekasi	Jawa Barat	90
13.	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	90

No.	Nama Instansi		Nilai
14.	Kota Depok	Jawa Barat	90
15.	Kota Bandung	Jawa Barat	90
16.	Kota Serang	Banten	90
17.	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	89
18.	Kota Surakarta	Jawa Tengah	88
19.	Kota Surabaya	Jawa Timur	88
20.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	88
21.	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	88
22.	Kota Magelang	Jawa Tengah	88
23.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	87
24.	Kota Bogor	Jawa Barat	87
25.	Kota Ambon	Maluku	86
26.	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	86
27.	Kota Pariaman	Sumatera Barat	84
28.	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah	83
29.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	83
30.	Kota Cimahi	Jawa Barat	82
31.	Kota Kediri	Jawa Timur	82
32.	Kota Mojokerto	Jawa Timur	82
33.	Kota Pasuruan	Jawa Timur	82
34.	Kota Banjar	Jawa Barat	82
35.	Kota Madiun	Jawa Timur	82
36.	Kota Binjai	Sumatera Utara	82
37.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	81
38.	Kota Sukabumi	Jawa Barat	81
39.	Kota Tangerang Selatan	Banten	81
40.	Kota Langsa	Aceh	81
41.	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	80
42.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	79
43.	Kota Pekanbaru	Riau	79
44.	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78
45.	Kota Subulussalam	Aceh	78
46.	Kota Lhokseumawe	Aceh	78

No.	Nama Instansi		Nilai
47.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	78
48.	Kota Parepare	Sulawesi Selatan	78
49.	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	77
50.	Kota Malang	Jawa Timur	77
51.	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	76
52.	Kota Cirebon	Jawa Barat	76
53.	Kota Probolinggo	Jawa Timur	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
54.	Kota Dumai	Riau	75
55.	Kota Blitar	Jawa Timur	74
56.	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	74
57.	Kota Solok	Sumatera Barat	73
58.	Kota Ternate	Maluku Utara	71
59.	Kota Batu	Jawa Timur	71
60.	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	71
61.	Kota Sabang	Aceh	70
62.	Kota Medan	Sumatera Utara	70
63.	Kota Banda Aceh	Aceh	69
64.	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	69
65.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	69
66.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	68
67.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	67
68.	Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	67
69.	Kota Bengkulu	Bengkulu	67
70.	Kota Sungai Penuh	Jambi	66
71.	Kota Gorontalo	Gorontalo	66
72.	Kota Baubau	Sulawesi Tenggara	65
73.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	64
74.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	63
75.	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	62
76.	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	62
77.	Kota Bitung	Sulawesi Utara	62
78.	Kota Cilegon	Banten	61

No.	Nama Instansi		Nilai
79.	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	61
80.	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	58
81.	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	54
82.	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	53
83.	Kota Sibolga	Sumatera Utara	53
84.	Kota Jayapura	Papua	52
85.	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	51
86.	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
87.	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	32

VIII. DPRD PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	DPRD Provinsi Lampung	94
2.	DPRD Provinsi Jawa Tengah	92
3.	DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	87
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
4.	DPRD Provinsi Jawa Timur	75
5.	DPRD Provinsi DKI Jakarta	71
6.	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	71
7.	DPRD Provinsi Banten	66
8.	DPRD Provinsi Bali	61
9.	DPRD Provinsi Jawa Barat	58
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
10.	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
11.	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	46
12.	DPRD Provinsi Maluku Utara	46
13.	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	32

IX. DPRD KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	93
2.	DPRD Kabupaten Batang	Jawa Tengah	91
3.	DPRD Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	90
4.	DPRD Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	89
5.	DPRD Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	85
6.	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	84
7.	DPRD Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	84
8.	DPRD Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	84
9.	DPRD Kabupaten Tabanan	Bali	83
10.	DPRD Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	83
11.	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	83
12.	DPRD Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	81
13.	DPRD Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	81
14.	DPRD Kabupaten Tangerang	Banten	81
15.	DPRD Kabupaten Klungkung	Bali	79
16.	DPRD Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	79
17.	DPRD Kabupaten Demak	Jawa Tengah	77
18.	DPRD Kabupaten Subang	Jawa Barat	77
19.	DPRD Kabupaten Buleleng	Bali	76
20.	DPRD Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	76
21.	DPRK Kabupaten Bireuen	Aceh	76
22.	DPRD Kabupaten Bengkalis	Riau	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
23.	DPRK Kabupaten Simeulue	Aceh	75
24.	DPRD Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	74
25.	DPRK Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	74
26.	DPRD Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	73
27.	DPRD Kabupaten Garut	Jawa Barat	73
28.	DPRD Kabupaten Jembrana	Bali	73
29.	DPRD Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	73
30.	DPRD Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	72

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
31.	DPRD Kabupaten Pandeglang	Banten	71
32.	DPRK Kabupaten Bener Meriah	Aceh	71
33.	DPRD Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	71
34.	DPRD Kabupaten Karangasem	Bali	71
35.	DPRD Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	70
36.	DPRD Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	70
37.	DPRD Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	69
38.	DPRK Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	69
39.	DPRD Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	69
40.	DPRK Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	69
41.	DPRD Kabupaten Malang	Jawa Timur	69
42.	DPRD Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	68
43.	DPRD Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	67
44.	DPRD Kabupaten Bandung	Jawa Barat	67
45.	DPRD Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	67
46.	DPRD Kabupaten Pati	Jawa Tengah	66
47.	DPRD Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	66
48.	DPRK Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	66
49.	DPRD Kabupaten Toba	Sumatera Utara	66
50.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	65
51.	DPRD Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	65
52.	DPRD Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	65
53.	DPRD Kabupaten Blora	Jawa Tengah	65
54.	DPRD Kabupaten Sampang	Jawa Timur	65
55.	DPRK Kabupaten Aceh Timur	Aceh	65
56.	DPRD Kabupaten Bogor	Jawa Barat	65
57.	DPRD Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	64
58.	DPRD Kabupaten Gresik	Jawa Timur	64
59.	DPRD Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	64
60.	DPRD Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	63
61.	DPRD Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	63
62.	DPRD Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	63
63.	DPRD Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	62

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
64.	DPRD Kabupaten Badung	Bali	61
65.	DPRD Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	61
66.	DPRD Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	61
67.	DPRD Kabupaten Siak	Riau	61
68.	DPRD Kabupaten Bangli	Bali	61
69.	DPRD Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	61
70.	DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	60
71.	DPRD Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	60
72.	DPRD Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	60
73.	DPRD Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	60
74.	DPRD Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	59
75.	DPRD Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	59
76.	DPRD Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	59
77.	DPRD Kabupaten Gianyar	Bali	59
78.	DPRD Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	59
79.	DPRD Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	58
80.	DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	58
81.	DPRD Kabupaten Blitar	Jawa Timur	58
82.	DPRD Kabupaten Madiun	Jawa Timur	58
83.	DPRD Kabupaten Seluma	Bengkulu	57
84.	DPRD Kabupaten Pematang	Jawa Tengah	57
85.	DPRD Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	57
86.	DPRD Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	56
87.	DPRD Kabupaten Jember	Jawa Timur	56
88.	DPRD Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	55
89.	DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	54
90.	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	53
91.	DPRD Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	53
92.	DPRD Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	53
93.	DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	52
94.	DPRD Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	52
95.	DPRD Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	52
96.	DPRD Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	52

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
97.	DPRD Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	51
98.	DPRD Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	51
99.	DPRD Kabupaten Kediri	Jawa Timur	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
100.	DPRD Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	50
101.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	50
102.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	Lampung	50
103.	DPRD Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	50
104.	DPRD Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	49
105.	DPRD Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	49
106.	DPRD Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	49
107.	DPRD Kabupaten Tuban	Jawa Timur	49
108.	DPRD Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	49
109.	DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	49
110.	DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	47
111.	DPRD Kabupaten Karawang	Jawa Barat	47
112.	DPRD Kabupaten Lebak	Banten	47
113.	DPRD Kabupaten Serang	Banten	46
114.	DPRD Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	46
115.	DPRD Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	46
116.	DPRD Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	46
117.	DPRD Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara	46
118.	DPRD Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	45
119.	DPRD Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	45
120.	DPRD Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	45
121.	DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	45
122.	DPRD Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	43
123.	DPRD Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	43
124.	DPRD Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	42
125.	DPRD Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	42
126.	DPRD Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	42
127.	DPRD Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	41
128.	DPRD Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	40

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
129.	DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	40
130.	DPRD Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	39
131.	DPRD Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	38
132.	DPRD Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	38
133.	DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	32
134.	DPRD Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	32
135.	DPRD Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	32
136.	DPRD Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	32
137.	DPRD Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	32
138.	DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	32
139.	DPRD Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	32
140.	DPRD Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	32
141.	DPRD Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	32
142.	DPRD Kabupaten Batang Hari	Jambi	29

X. DPRD KOTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kota Bandung	Jawa Barat	95
2.	DPRD Kota Semarang	Jawa Tengah	89
3.	DPRD Kota Surakarta	Jawa Tengah	88
4.	DPRD Kota Tegal	Jawa Tengah	84
5.	DPRD Kota Salatiga	Jawa Tengah	83
6.	DPRD Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	81
7.	DPRD Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	80
8.	DPRD Kota Cimahi	Jawa Barat	76
Kategori DWI TUNGGU (Nilai 51 s.d. 75)			
9.	DPRD Kota Batam	Kepulauan Riau	75
10.	DPRD Kota Pekalongan	Jawa Tengah	75
11.	DPRD Kota Tangerang Selatan	Banten	73
12.	DPRD Kota Probolinggo	Jawa Timur	72
13.	DPRD Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	70
14.	DPRD Kota Metro	Lampung	69

No.	Nama Instansi		Nilai
15.	DPRD Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	69
16.	DPRD Kota Sukabumi	Jawa Barat	68
17.	DPRD Kota Bontang	Kalimantan Timur	66
18.	DPRD Kota Dumai	Riau	66
19.	DPRD Kota Banjar	Jawa Barat	65
20.	DPRD Kota Madiun	Jawa Timur	65
21.	DPRD Kota Denpasar	Bali	63
22.	DPRD Kota Cirebon	Jawa Barat	62
23.	DPRD Kota Tanjungbalai	Sumatera Utara	60
24.	DPRD Kota Bandar Lampung	Lampung	60
25.	DPRD Kota Batu	Jawa Timur	60
26.	DPRD Kota Bogor	Jawa Barat	58
27.	DPRD Kota Bekasi	Jawa Barat	58
28.	DPRD Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	57
29.	DPRD Kota Magelang	Jawa Tengah	53
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
30.	DPRD Kota Cilegon	Banten	49
31.	DPRD Kota Blitar	Jawa Timur	49
32.	DPRD Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	48
33.	DPRD Kota Sibolga	Sumatera Utara	48
34.	DPRD Kota Pasuruan	Jawa Timur	47
35.	DPRD Kota Kediri	Jawa Timur	45
36.	DPRD Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	39
37.	DPRD Kota Tarakan	Kalimantan Utara	38
38.	DPRD Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	38
39.	DPRD Kota Tangerang	Banten	37

XI. PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat	97
2.	Universitas Tidar	Jawa Tengah	93

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
3.	Universitas Lampung	Lampung	90
4.	Universitas Terbuka	Banten	87
5.	Universitas Narotama	Jawa Timur	83
6.	Universitas Bandar Lampung	Lampung	83
7.	Universitas Pamulang	Banten	82
8.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Jawa Barat	81
9.	Universitas Pasir Pengaraian	Riau	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
10.	Universitas Pancasila	DKI Jakarta	75
11.	Universitas Warmadewa	Bali	74
12.	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah	73
13.	Universitas Trunojoyo	Jawa Timur	59
14.	Universitas Airlangga	Jawa Timur	59
15.	Universitas YARSI	DKI Jakarta	55
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
16.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Jawa Timur	34

XII. UNIT ESELON I KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	98
2.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	86
3.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	81
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
4.	Inspektorat Jenderal	70
5.	Direktorat Jenderal Imigrasi	62

XIII. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		

No.	Nama Instansi	Nilai
1.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	94
2.	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	92
3.	Kantor Wilayah Jawa Barat	92
4.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	91
5.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	90
6.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	89
7.	Kantor Wilayah Banten	89
8.	Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	88
9.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	88
10.	Kantor Wilayah DKI Jakarta	88
11.	Kantor Wilayah Jawa Timur	88
12.	Kantor Wilayah Sumatera Barat	88
13.	Kantor Wilayah Riau	87
14.	Kantor Wilayah Lampung	87
15.	Kantor Wilayah Jambi	86
16.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	86
17.	Kantor Wilayah Maluku Utara	85
18.	Kantor Wilayah Bali	84
19.	Kantor Wilayah Bengkulu	84
20.	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	84
21.	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	83
22.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	83
23.	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	83
24.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat	83
25.	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	83
26.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	82
27.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	82
28.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	82
29.	Kantor Wilayah Maluku	81
30.	Kantor Wilayah Gorontalo	80
31.	Kantor Wilayah Aceh	79

XIV. UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	42


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY